

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

TESIS

OLEH

**MARWANSYAH
NPM. 121801087**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama : Marwansyah

NPM : 121801087

Menyetujui

Pembimbing I



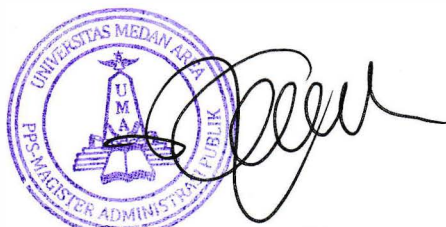
Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



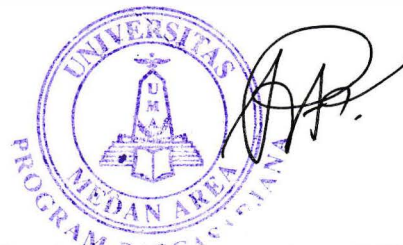
Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2014

Nama : Marwansyah

NPM : 121801087



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Penguji Tamu : Dr. Kaiman Turnip, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2014

Yang menyatakan,



Marwansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya sehingga penulis masih dapat menyelesaikan pengerjaan Tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Judul yang penulis angkat pada Tesis ini adalah "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA".

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan waktu yang dimiliki dan belum sepenuhnya penulis mampu menyajikan suatu permasalahan secara keseluruhan mengenai hal-hal yang belum terungkapkan dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;

3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Pembimbing I yang sangat membantu kelancaran dalam pembimbingan dan penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Drs. Kariono, MA sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini;
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Orangtuaku, Istri dan Anak-Anakku yang telah memberikan dorongan yang begitu besar dalam menyelesaikan studi Magister ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu selama mengikuti perkuliahan;

Semoga ilmu, dukungan serta dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Medan, April 2014
Penulis

MARWANSYAH

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nama : Marwansyah
N P M : 121801087
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Melihat kondisi saat ini Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan daerah pemekaran, peranan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan personil Pegawai Negeri Sipil dan langkah awal untuk pembinaan dan penataan sekaligus pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil agar disiplin waktu dan disiplin jam kerja 37,5 jam kerja benar-benar dijalankan.

Oleh karena itu peran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus benar-benar efektif dan profesional dalam menyikapi terhadap seluruh permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat membuat strategi dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Keywords : Implementasi, Disiplin Pegawai

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	14
2.1.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	18
2.2 Landasan Teori Disiplin Kerja	20
2.2.1. Pengertian Disiplin.....	20
2.2.2. Tujuan Disiplin Kerja.....	21
2.2.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja	22
2.2.4. Pendekatan Disiplin Kerja.....	24
2.2.5. Prinsip-prinsip Pendisiplinan	26
2.2.6. Alat Untuk Mengukur Disiplin Kerja.....	27
2.3 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Waktu Penelitian	45
3.3 Sumber Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Jenis Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	50
4.2 Gambaran Umum BKD Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	67
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010	76
5.3 Upaya-Upaya mengatasi kendala dan permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara	82
5.4 Analisis Pembahasan	85
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara	52
Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara	53
Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	64
Tabel 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal	64
Tabel 5. Komposisi Pegawai berdasarkan Diklat Penjejang	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Kabupaten Labuhanbatu Utara	51
Gambar 2. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Labuhanbatu Utara	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Disiplin Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun selalu menjadi sorotan publik. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil semakin membuat citra pelayan publik ini semakin parah. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran makin meningkat. Pelanggaran itu dari berbagai tingkatan, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus dan permasalahan yang harus diselesaikan di sub bagian kepegawaian, tidak pernah ada selesainya (Sadly Abdul Jabar, 2003).

Penerapan peraturan disiplin pegawai berkaitan erat dengan motivasi dan perilaku. Pelanggaran terhadap disiplin pegawai ini kebanyakan dilatarbelakangi adanya suatu motivasi tertentu. Motivasi ini yang akan membentuk perilaku. Perilaku yang terus menerus akan menjadi budaya. Berbagai motivasi di balik munculnya berbagai pelanggaran ini. Tapi apapun motivasinya pelanggaran disiplin harus ditindaklanjuti (Sadly Abdul Jabar, 2003).

Peraturan yang ada selama ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 dianggap sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi persoalan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini akhirnya dipandang sebagai salah satu alasan untuk dilakukan perubahan, sehingga muncul Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Adanya peraturan yang baru ini dianggap sebagai salah satu reformasi birokrasi yang antara

lain dimaksudkan agar lebih terjamin ketertiban, kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk lebih meningkatkan disiplin menuju lebih terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap suatu pelanggaran (Delvi Demayanti, 2012).

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas (Delvi Demayanti, 2012).

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja (Delvi Demayanti, 2012).

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aneta Spendzharova & Esther Versluis, 2013, *Journal of European Public Policy*, Volume 20, Issue 10.
- C.V. Som, 2011, *International Journal of Public Policy* Volume. 7 Nomor 1
- Delvi Demayanti, 2012, *Jurnal Transformasi*, Volume 14, Nomor 22.
- Djokosantoso, Moelyono. 2003. *Dimensi-dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN Jakarta.
- Keban, Yeremias T, 2004, Pokok-pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM*, no.2, vol.8, 18,
- Mustopadidjaja, AR. 2005. *Paradigma Pembangunan dan Pembangunan Indonesia*.
- Omoregie Charles Osifo, 2014 *International Journal of Public Administration*, Volume 37, Issue 4.
- Sadly Abdul Jabar, Perkembangan dan Peran Ilmu Administrasi dalam Pembangunan Nasional di Sektor Publik, dalam *Jurnal Administrasi Negara “Perkembangan Administrasi Negara Di Indonesia*. Vol.III No. 2 Maret 2003
- Sanford Journal Of Public Policy, Volume 1, Issue 1, Spring 2010.
- Sedarmayanti, DR. M,Pd. 2009. “Reformasi Administrasi Publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung : Reflika Aditama, 2009.
- Senge Peter M. The Fifth Dicipline (1995) terjemahan “ Disiplin Kelima “ Bina Pura Aksara, Jakarta, 1996.
- Senge, Peter M. Kleiner Art, Robert Charlotte, Ross Richard & Smith Bryan 2002 : *Buku Pegangan Disiplin Kelima*”, saduran : Suminto. Hari. Ir, Saputra Lyndan DR, Interaksara, Jakarta.
- Siswididjojo, Suparto S, Dr, 2002: “Berpikir Sistemik dalam menganalisa dan merumuskan Kebijakan Publik”, Bandung

- Skok & Harrisbury, 1995, *Policy Issue Networks and The Public Policy Cycle*, 55.4.
- Snider & Rendon, 2008, *Journal of Public Procurement*
- Sudarsono H, DR., Ir., MA., SH, 2012: “Learning Organization”, Ceramah Umum Diklatpim Tingkat II Angkatan II, Bandung.
- Sujatno, Adi, SH., DR., 2010: “Teori-teori Kepemimpinan”, Cetakan kedua, Lemhannas RI, Jakarta.
- Sujatno, Adi, SH., DR., 2012: “Nilai-nilai Kepemimpinan-Peran Pemimpin Aparatur Pemerintah”, Ceramah Diklatpim Tingkat II Angkatan II, Bandung
- Sutarto. 2001. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Walters, Aydelotte, Miller, 2000, “Putting more Public in Policy Analysis”, *Journal Public Administration. Review*, July/August/2000, 60,4.
- LAN RI, 2004. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara.*
- LAN RI, 2012. *Kajian Paradigma Kepemimpinan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan II, Bandung.*
- LAN RI, 2012. *Kajian Kebijakan Publik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan II, Bandung.*
- LAN RI, 2012. *Panduan Teknis Aktualisasi Diklatpim Tingkat II Angkatan II , Bandung.*

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979, huruf (h), disebutkan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklatpim bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan BKD

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

WEBSITE

<http://jurnal.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/82041532.pdf>, diakses tanggal 15 Februari